



KEBUDAYAAN SEBAGAI FONDASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM RUU SISDIKNAS

Yulia Indahri*

Abstrak

Kebudayaan dalam sistem pendidikan nasional masih menghadapi tantangan integrasi yang sistemis, terutama di tengah globalisasi dan digitalisasi yang mendorong erosi nilai lokal dan terputusnya transmisi antargenerasi. Tulisan ini bertujuan mengelaborasi posisi kebudayaan sebagai dasar sistemis dalam revisi Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) serta merumuskan arah integrasinya dalam praktik pendidikan nasional. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendidikan yang kurang berakar pada konteks budaya berpotensi melemahkan pembentukan identitas dan karakter peserta didik, sementara integrasi budaya yang kontekstual dan bermakna terbukti meningkatkan relevansi pembelajaran dan keterikatan sosial. Dari sisi kebijakan, relasi antara pemajuan kebudayaan dan sistem pendidikan belum terbangun secara konsisten dan masih bergantung pada inisiatif lokal, sehingga memerlukan penguatan pengaturan, dukungan implementasi, dan tata kelola lintas sektor. Oleh karena itu, DPR RI, khususnya Komisi X, berperan strategis untuk memperkuat landasan normatif dalam RUU Sisdiknas, memastikan dukungan anggaran, serta melakukan pengawasan agar kebudayaan terintegrasi secara berkelanjutan dalam sistem pendidikan nasional.

Pendahuluan

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), kebudayaan perlu ditempatkan sebagai dasar yang bersifat sistemis dan sejajar dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Penegasan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta, dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja RUU Sisdiknas pada 1 Desember 2025. Ia menekankan bahwa budaya dalam pendidikan tidak boleh dipahami semata sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai ruh kebijakan yang menjiwai keseluruhan sistem pendidikan, membentuk identitas, karakter, kohesi sosial, dan daya saing bangsa (Wibawarta, 2025).

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi yang kian intensif, kebudayaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Erosi nilai-nilai lokal, komersialisasi tradisi, hingga kesenjangan literasi digital menjadi persoalan nyata yang berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan praktik budaya ("Tantangan Melestarikan Bujangga," 2023). Namun demikian, dinamika tersebut juga menunjukkan bahwa kebudayaan memiliki daya adaptif yang kuat apabila didukung oleh ekosistem yang tepat. Kompetisi Budaya Go! menjadi salah

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: yulia.indahri@dpr.go.id

satu contoh kolaborasi antara pelaku budaya dan teknologi dalam menghadirkan inovasi digital (Sinaga, 2025).

Fenomena glokalisasi semakin menegaskan bahwa budaya lokal tidak sekadar bertahan, tetapi berevolusi di ruang digital melalui berbagai ekspresi kreatif, seperti meme berbahasa daerah, kampanye kebaya, serta musik hibrid yang memadukan unsur tradisional dan modern. Berangkat dari dinamika tersebut, tulisan ini bertujuan mengelaborasi strategi pengintegrasian kebudayaan dalam RUU Sisdiknas agar pendidikan nasional tetap berakar pada jati diri bangsa sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika lokal dan global.

Budaya sebagai Fondasi Pendidikan

Pada tataran praktik, kebudayaan di sekolah kerap direduksi menjadi mata pelajaran atau kegiatan tambahan, padahal secara konseptual kebudayaan merupakan fondasi nilai yang membentuk identitas, pola pikir, dan orientasi hidup peserta didik. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendidikan yang kurang berakar pada konteks budaya berpotensi menghasilkan capaian kognitif yang baik, namun belum optimal dalam membangun identitas dan karakter peserta didik (Manarfa & Lasaiba, 2024; Rahmawati *et al.*, 2021).

Bukti empiris di tingkat satuan pendidikan memperkuat pandangan tersebut. Penelitian di pendidikan dasar menunjukkan bahwa integrasi budaya lokal dalam kurikulum meningkatkan relevansi pembelajaran sekaligus memperkuat keterikatan peserta didik dengan lingkungan sosial dan budayanya (Sarumaha *et al.*, 2024; Zahrika & Andaryani, 2023). Sebaliknya, pengabaian terhadap konteks budaya dalam pembelajaran berkontribusi pada rendahnya kebanggaan terhadap bahasa dan tradisi lokal, serta kecenderungan melihat budaya sendiri sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan masa depan.

Kesenjangan antara pendidikan dan pemajuan kebudayaan semakin terlihat dalam realitas sosial. Laporan Khasanah (2025) menunjukkan bahwa banyak bahasa daerah menghadapi risiko kepunahan akibat menurunnya penggunaan secara konsisten, termasuk di lingkungan pendidikan formal dan dalam praktik sosial sehari-hari. Terputusnya transmisi antargenerasi menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya berfungsi sebagai wahana pewarisan budaya, yang tercermin dari menurunnya penggunaan bahasa dan praktik budaya lokal dalam pendidikan formal maupun kehidupan sehari-hari (Khasanah, 2025).

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, tantangan tersebut menuntut perhatian kebijakan yang lebih serius. Interaksi intensif generasi muda dengan budaya global melalui media digital, tanpa diimbangi integrasi budaya lokal dalam pembelajaran, berpotensi menjadikan peserta didik sekadar konsumen budaya, bukan produsen pengetahuan dan ekspresi kreatif yang berakar pada jati dirinya (Azka *et al.*, 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan budaya dalam pendidikan bukan semata isu kultural, melainkan isu strategis yang berkaitan langsung dengan arah pembangunan manusia dan identitas nasional.

Pengalaman berbagai negara memperlihatkan bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi justru dibangun di atas nilai budaya inti yang ditanamkan secara konsisten melalui sistem pendidikan. Nilai kerja, etika sosial, kreativitas, dan kedisiplinan dibentuk melalui kebijakan pendidikan yang sadar budaya dan berjangka panjang (Wibawarta, 2025). Dalam konteks Indonesia, kekayaan budaya lokal seharusnya diposisikan sebagai sumber pembelajaran strategis untuk membentuk karakter, inovasi, dan daya saing bangsa.

Dari sisi regulasi, kerangka hukum pemajuan kebudayaan telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun, berbagai kajian dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa integrasi kebijakan kebudayaan ke dalam sistem pendidikan belum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Akibatnya, penguatan kebudayaan dalam pendidikan sering kali bergantung pada inisiatif lokal dan belum terlembagakan secara sistemis (Wibawarta, 2025).

Strategi Integrasi Kebudayaan dalam RUU Sisdiknas

Integrasi kebudayaan dalam RUU Sisdiknas memerlukan strategi yang konkret dan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh jenjang pendidikan. Kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi adalah memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung dan bermakna dengan budaya bangsanya. Pandangan ini sejalan dengan penekanan bahwa kebudayaan tidak boleh berhenti sebagai simbol atau kegiatan seremonial, melainkan perlu menjiwai proses pendidikan sehari-hari (Wibawarta, 2025).

Penjabaran lebih lanjut dari strategi umum tersebut adalah, *pertama*, RUU Sisdiknas perlu mendorong kebudayaan hadir sebagai bagian dari proses pembelajaran harian, bukan sekadar aktivitas insidental. Selama ini, praktik kebudayaan di sekolah masih sering terbatas pada peringatan hari besar atau pertunjukan seni yang berdiri sendiri dan tidak terhubung secara sistematis dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum. Strategi menghadirkan kebudayaan sebagai bagian dari proses pembelajaran harian menegaskan pentingnya kebudayaan menjiwai kegiatan belajar lintas mata pelajaran secara kontekstual dan bermakna (Wibawarta, 2025).

Kedua, beberapa kajian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis konteks budaya lokal, melalui proyek budaya, dokumentasi tradisi, serta keterlibatan komunitas, mampu meningkatkan relevansi pembelajaran sekaligus memperkuat keterikatan peserta didik dengan lingkungan sosial dan budayanya (Sarumaha *et al.*, 2024; Zahrika & Andaryani, 2023). Pendekatan ini tidak hanya memperkaya literasi budaya, tetapi juga membangun rasa memiliki dan tanggung jawab sosial peserta didik, sebagaimana ditekankan dalam kajian identitas dan keberagaman di ruang kelas oleh Rahmawati *et al.*, (2021).

Strategi *ketiga* berkaitan dengan perkembangan digital yang mendorong integrasi kebudayaan ke dalam pendidikan dengan berbagai tantangan dan peluang. Praktik budaya di ruang digital menunjukkan bahwa kebudayaan dapat beradaptasi dan menjangkau generasi muda melalui media dan ekspresi baru apabila didukung oleh ekosistem pembelajaran yang tepat (Sinaga, 2025). Oleh karena itu, RUU Sisdiknas perlu memberikan kerangka integrasi kebudayaan ke ruang digital yang diarahkan untuk mendukung pembelajaran, dokumentasi, dan transmisi nilai budaya, sekaligus memperkuat identitas peserta didik di tengah arus globalisasi (Azka *et al.*, 2025).

Keempat, agar strategi integrasi kebudayaan berjalan efektif, pendidik perlu didorong berperan sebagai fasilitator literasi budaya yang mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks budaya peserta didik. Penguatan kapasitas pendidik diperlukan agar kebudayaan tidak hanya hadir sebagai muatan tambahan, tetapi terintegrasi secara pedagogis dalam proses belajar mengajar (Rahmawati *et al.*, 2021).

Kelima, RUU Sisdiknas juga perlu mendorong tata kelola yang lebih terkoordinasi antara sektor pendidikan dan kebudayaan pada tingkat implementasi. Tanpa kerangka yang jelas, penguatan kebudayaan dalam pendidikan berisiko bergantung pada inisiatif sporadis di tingkat sekolah atau daerah.

Penutup

Kebudayaan dalam RUU Sisdiknas perlu ditempatkan sebagai fondasi sistem pendidikan nasional yang bersifat sistemis dan menjiwai seluruh proses pembelajaran, bukan sekadar dipahami sebagai mata pelajaran atau kegiatan seremonial. Kebudayaan menghadapi tantangan serius berupa erosi nilai lokal, terputusnya transmisi antargenerasi, serta dominasi budaya global dalam ruang belajar peserta didik. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pendidikan yang tidak berakar pada konteks budaya akan lemah dalam pembentukan identitas, karakter, dan kohesi sosial. Sebaliknya, integrasi kebudayaan yang kontekstual terbukti meningkatkan relevansi pembelajaran, literasi budaya, dan keterikatan sosial peserta didik, sekaligus memperkuat daya adaptif pendidikan nasional terhadap dinamika lokal dan global.

DPR RI, melalui Komisi X yang sedang melakukan penyusunan RUU Sisdiknas, berperan strategis dalam memastikan revisi memberikan landasan normatif yang kuat bagi integrasi kebudayaan dalam sistem pendidikan nasional. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI dapat mendorong penguatan tata kelola lintas sektor serta memastikan kebudayaan benar-benar terintegrasi secara berkelanjutan dalam praktik pendidikan di seluruh satuan pendidikan.

Referensi

- Azka, A. A., Rahmawan, A. I. F., Gustaman, R. I., & Jati, T. K. (2025). Peran bahasa Indonesia dan keberagaman budaya dalam mempertahankan identitas nasional di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 4(2), 38–48.
- Khasanah, U. Z. (2025, Februari 24). *Riset BRIN: Bahasa daerah terancam punah, bagaimana upaya konservasinya?* Teknologi. <https://teknologi.id/insight/riset-brin-bahasa-daerah-terancam-punah-bagaimana-upaya-konservasinya>
- Manarfa, A. & Lasaiba, D. (2024). Jejak karakter di atas budaya: Menelusuri identitas dalam pendidikan. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah dan Budaya*, 4(1), 67–75.
- Rahmawati, H., Afifah, R., Cholifah, F. N., & Rahman, A. (2021). Signifikansi kebudayaan dalam pendidikan: Refleksi identitas keberagaman siswa di ruang kelas. *Belantika Pendidikan*, 4(2), 64–70.
- Sarumaha, M., Telaumbanua, K., & Harefa, D. (2024). Pendidikan berbasis kearifan lokal Nias Selatan: Membangun identitas budaya pada generasi muda. *Jurnal Education and Development*, 12(3), 663–668.
- Sinaga, T. M. (2025, Oktober 23). *Berkolaborasi menjaga relevansi budaya di era digital*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/berkolaborasi-menjaga-relevansi-budaya-di-era-digital>
- *Tantangan melestarikan Bujangga di era digital*. (2023, Januari 30). Tempo. <https://www.tempo.co/info-tempo/tantangan-melestarikan-bujangga-di-era-digital-789240>
- Wibawarta, B. (2025, Desember 1). *Masukan RUU Sistem Pendidikan Nasional* [Paparan]. Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, Jakarta.
- Zahrika, N. A., & Andaryani, E. T. (2023). Kurikulum berbasis budaya untuk sekolah dasar: Menyelaraskan pendidikan dengan identitas lokal. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(2), 163–169.

